WALI KOTA GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemenerintah Daerah dan DPRD;

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN
SEKDA

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



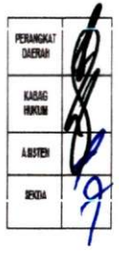
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Amggaran 2023;

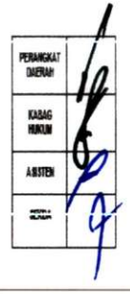
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Pendapatan : | | | |
| a. | semula | Rp. | 1.116.944.908.905,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | (10.439.627.000,00) |
| | Jumlah Pendapatan setelah perubahan | Rp. | 1.106.505.281.905,00 |
| 2. Belanja : | | | |
| a. | semula | Rp. | 1.084.712.015.755,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | (9.245.995.917,00) |
| | Jumlah belanja setelah perubahan | Rp. | 1.075.466.019.838,00 |
| | Surplus/(Defisit) setelah perubahan | Rp. | 31.039.262.067,00 |
| 3. Pembiayaan : | | | |
| 1. | Penerimaan Pembiayaan | | |
| a. | semula | Rp. | 12.400.000.000,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | (163.891.810,00) |
| | Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 12.236.108.190,00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | Pengeluaran pembiayaan | | |
| | a. semula | Rp. | 44.632.893.150,00 |
| | b. bertambah/berkurang | Rp. | (1.357.522.893,00) |
| | Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 43.275.370.257,00 |
| | Jumlah pembiayaan Netto setelah perubahan | Rp. | (31.039.262.067,00) |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| | Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | Rp. | 1.118.741.390.095,00 |

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | | |
| | a. semula | Rp. | 364.506.051.148,00 |
| | b. bertambah/berkurang | Rp. | 18.314.541.514,00 |
| | Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | 382.820.592.662,00 |
| b. | Pendapatan transfer | | |
| | a. semula | Rp. | 730.724.316.243,00 |
| | b. bertambah/berkurang | Rp. | (13.665.627.000,00) |
| | Jumlah dana transfer setelah perubahan | Rp. | 717.058.689.243,00 |

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana di maksud pada ayat 1 huruf c

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | semula | Rp. | 21.714.541.514,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | (15.088.541.514,00) |
| | Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang setelah perubahan | Rp. | 6.626.000.000,00 |

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jenis pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak Daerah

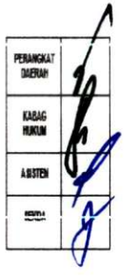
| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | semula | Rp. | 116.404.000.000,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| | **Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan** | Rp. | 116.404.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah

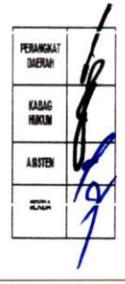
| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | semula | Rp. | 238.243.190.500,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | 6.600.000.000,00 |
| | Jumlah retribusi setelah perubahan | Rp. | 244.843.190.500,00 |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | semula | Rp. | 5.500.000.000,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah setelah perubahan | Rp. | 5.500.000.000,00 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| d. | Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah | | | |
| | a. semula | Rp. | 4.358.860.648,00 |
| | b. bertambah/berkurang | Rp. | 11.714.541.514,00 |
| | Jumlah lain-lain pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp. | 16.073.402.162,00 |
| (3) | Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : | | |
| a. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | | |
| | a. semula | Rp. | 696.751.300.000,00 |
| | b. bertambah/berkurang | Rp. | (13.665.627.000,00) |
| | Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan | Rp. | 683.085.673.000,00 |
| b. | Pendapatan Transfer antar Daerah | | |
| | a. semula | Rp. | 33.973.016.243,00 |
| | b. bertambah/berkurang | Rp. | 0,00 |
| | Jumlah Pendapatan Transfer antar Daerah setelah perubahan | Rp. | 33.973.016.243,00 |
| (4) | Lain-lain pendapatan Daerah yang sah | | |
| a. | Pendapatan Hibah | | |
| | a. semula | Rp. | 0,00 |
| | b. bertambah/berkurang | Rp. | 626.000.000,00 |
| | Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan | Rp. | 626.000.000,00 |



b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | semula | Rp. | 21.714.541.514,00 |
| b. | bertambah/berkurang | Rp. | (15.714.541.514,00) |
| | Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan setelah perubahan | Rp. | 6.000.000.000,00 |

Pasal 3

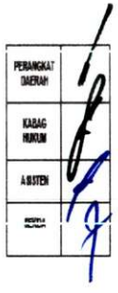
(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 1.001.604.102.013,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | (13.697.366.019,00) |
| Jumlah belanja Operasi setelah Perubahan | Rp | 987.906.735.994,00 |

b. Belanja Modal

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 78.407.913.742,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | (20.962.689,00) |
| Jumlah belanja Modal setelah Perubahan | Rp. | 78.386.951.053,00 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| c. Belanja Tidak terduga | | | |
| | semula | Rp. | 3.500.000.000,00 |
| | bertambah/berkurang | Rp. | 5.072.332.791,00 |
| | Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | 8.572.332.791,00 |
| d. Belanja Transfer | | | |
| | semula | Rp. | 1.200.000.000,00 |
| | bertambah/berkurang | Rp. | (600.000.000,00) |
| | Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | 600.000.000,00 |

(2) Belanja Operasi sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. Belanja Pegawai | | | |
| | semula | Rp. | 503.666.410.098,56 |
| | bertambah/berkurang | Rp. | (18.878.826.495,60) |
| | Jumlah belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp | 484.787.583.602,96 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | | | |
| | semula | Rp. | 489.149.381.471,44 |
| | bertambah/berkurang | Rp. | (1.165.129.436,60) |
| | Jumlah belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. | 490.314.510.908,04 |



c. Belanja Hibah

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 6.538.995.443,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | 3.435.231.040,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. | 9.974.226.483,00 |

d. Belanja Bantuan Sosial

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 2.249.315.000,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | 581.100.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. | 2.830.415.000,00 |

(3) Belanja Modal sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 terdiri dari:

a.. Belanja Modal tanah

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 5.000.000,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | 204,00 |
| Jumlah belanja Modal Tanah setelah Perubahan | Rp | 5.000.204,00 |

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 39.016.541.126,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | 3.091.033.837,00 |
| Jumlah belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan | Rp. | 42.107.574.963,00 |

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN

c. Belanja Modal gedung dan Bangunan

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 19.968.882.413,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | 2.840.915,00 |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan | Rp. | 19.966.041.498,00 |

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 17.517.263.537,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | (3.222.829.815,00) |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan | Rp. | 14.294.433.722,00 |

e. Belanja Modal Aset tetap lainnya

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 1.900.226.666,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | 63.674.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal Aset tetap lainnya setelah Perubahan | Rp. | 1.963.900.666,00 |

f. Belanja Modal Aset lainnya

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 0,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | 50.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal Aset lainnya setelah Perubahan | Rp. | 50.000.000,00 |

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana di maksud pada pasal 3 ayat 1 huruf C

a. Belanja Tidak Terduga

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 3.500.000.000,00 |

| | | |
|---|---|---|
| bertambah/berkurang | Rp. | 5.072.332.791,00 |
| Jumlah belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | Rp | 8.572.332.791,00 |

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 huruf d

a. Belanja Bantuan Keuangan

| | | |
|---|---|---|
| semula | Rp. | 1.200.000.000,00 |
| bertambah/berkurang | Rp. | (600.000.000,00) |
| Jumlah Belanja Tidak terduga setelah Perubahan | Rp. | 600.000.000,00 |

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah

| | | |
|---|---|---|
| 1). Semula | Rp. | 12.400.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. | (163.891.810,00) |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. | 12.236.108.190,00 |

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah

| | | |
|---|---|---|
| 1). Semula | Rp. | 44.632.893.150,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. | (1.357.522.893,00) |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. | 43.275.370.257,00 |



(2). Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

| | | |
|---|---|---|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | | |
| 1). Semula | Rp. | 12.400.000.000,00 |
| 2). Bertambah/berkurang | Rp. | (163.891.810,00) |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan | Rp. | 12.236.108.190,00 |

(3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

| | | |
|---|---|---|
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | | |
| 1). Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang). | Rp. | 0,00 |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sejumlah | | |
| 1). Semula | Rp. | 42.632.893.150,00 |
| 2). Bertambah/(berkurang) | Rp. | (1.357.522.893,00) |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan | Rp. | 41.275.370.257,00 |



Pasal 5

(1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum dan atau setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui ketetapan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi darurat, mendesak dan perubahan Prioritas Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah dan/atau telah ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kondisi darurat sebagiamana dimaksud pada ayat (2 )meliputi ;

a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan / atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik.

(4) Kondisi mendesak sebagiamana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;

a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan / atau



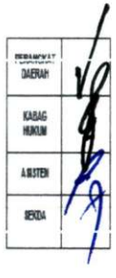
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat;

(5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat di lakukan sebelum Perubahan Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika Pergeseran tersebut dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Laporkan dalam Realisasi Anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang di klasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan beserta sub keluaran kota gorontalo Tahun Anggaran 2025;



| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Lampiran | V | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025; |
| 6. | Lampiran | VI | Rekapitulasi Belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025; |
| 7. | Lampiran | VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025; |
| 8. | Lampiran | VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; |
| 9. | Lampiran | IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; |
| 10. | Lampiran | X | Daftar Jumlah pegawai Pergolongan dan Perjabatan Tahun Anggaran 2025; |
| 11 | Lampiran | XI | Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025; |

Pasal 7

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal, 8 September 2025
WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal, 8 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

PERANGKAT DAERAH
KABAG HUKUM
ASISTEN

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : ( 4/20/2025 )

Lampiran I : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **4** | **PENDAPATAN DAERAH** | | | |
| **4.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** | **364.506.051.148,00** | **382.820.592.662,00** | **18.314.541.514,00** |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 116.404.000.000,00 | 116.404.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 238.243.190.500,00 | 244.843.190.500,00 | 6.600.000.000,00 |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.500.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | 0,00 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 4.358.860.648,00 | 16.073.402.162,00 | 11.714.541.514,00 |
| **4.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **730.724.316.243,00** | **717.058.689.243,00** | **-13.665.627.000,00** |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 696.751.300.000,00 | 683.085.673.000,00 | -13.665.627.000,00 |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 33.973.016.243,00 | 33.973.016.243,00 | 0,00 |
| **4.3** | **LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH** | **21.714.541.514,00** | **6.626.000.000,00** | **-15.088.541.514,00** |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 626.000.000,00 | 626.000.000,00 |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 21.714.541.514,00 | 6.000.000.000,00 | -15.714.541.514,00 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **1.116.944.908.905,00** | **1.106.505.281.905,00** | **-10.439.627.000,00** |
| **5** | **BELANJA DAERAH** | | | |
| **5.1** | **BELANJA OPERASI** | **1.001.604.102.013,00** | **987.906.735.994,00** | **-13.697.366.019,00** |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 503.666.410.098,56 | 484.787.583.602,96 | -18.878.826.495,60 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 489.149.381.471,44 | 490.314.510.908,04 | 1.165.129.436,60 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 6.538.995.443,00 | 9.974.226.483,00 | 3.435.231.040,00 |
| 5.1.06 | Belanja Bantuan Sosial | 2.249.315.000,00 | 2.830.415.000,00 | 581.100.000,00 |
| **5.2** | **BELANJA MODAL** | **78.407.913.742,00** | **78.386.951.053,00** | **-20.962.689,00** |
| 5.2.01 | Belanja Modal Tanah | 5.000.000,00 | 5.000.204,00 | 204,00 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 39.016.541.126,00 | 42.107.574.963,00 | 3.091.033.837,00 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 19.968.882.413,00 | 19.966.041.498,00 | -2.840.915,00 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 17.517.263.537,00 | 14.294.433.722,00 | -3.222.829.815,00 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 1.900.226.666,00 | 1.963.900.666,00 | 63.674.000,00 |
| 5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya | 0,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| **5.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **3.500.000.000,00** | **8.572.332.791,00** | **5.072.332.791,00** |
| 5.3.01 | Belanja Tidak Terduga | 3.500.000.000,00 | 8.572.332.791,00 | 5.072.332.791,00 |
| **5.4** | **BELANJA TRANSFER** | **1.200.000.000,00** | **600.000.000,00** | **-600.000.000,00** |
| 5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan | 1.200.000.000,00 | 600.000.000,00 | -600.000.000,00 |
| | **Jumlah Belanja** | **1.084.712.015.755,00** | **1.075.466.019.838,00** | **-9.245.995.917,00** |
| | **Total Surplus/(Defisit)** | **32.232.893.150,00** | **31.039.262.067,00** | **-1.193.631.083,00** |
| **6** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | | |
| **6.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **12.400.000.000,00** | **12.236.108.190,00** | **-163.891.810,00** |

| KODE | URAIAN | JUMLAH (Rp) | | BERKURANG/BERTAMBAH |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM (Rp) | SESUDAH (Rp) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.400.000.000,00 | 12.236.108.190,00 | -163.891.810,00 |
| **6.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **44.632.893.150,00** | **43.275.370.257,00** | **-1.357.522.893,00** |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | 0,00 |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 42.632.893.150,00 | 41.275.370.257,00 | -1.357.522.893,00 |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **44.632.893.150,00** | **43.275.370.257,00** | **-1.357.522.893,00** |
| | **Pembiayaan Netto** | **-32.232.893.150,00** | **-31.039.262.067,00** | **1.193.631.083,00** |
| **6.3** | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran II : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

**KOTA GORONTALO**
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**
**TAHUN ANGGARAN 2025**

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 226.525.000.000,00 | 244.839.541.514,00 | 655.223.134.837,00 | 656.847.414.205,00 | 54.849.933.258,00 | 51.172.708.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710.073.068.095,00 | 708.020.122.205,00 | -2.052.945.890,00 |
| 1 | 01 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 236.797.841.707,00 | 226.207.181.778,00 | 9.846.502.484,00 | 16.158.010.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.644.344.191,00 | 242.365.192.484,00 | -4.279.151.707,00 |
| 1 | 01 | 1.01.2.22.0.00.02.0000 | Dinas Pendidikan | 275.000.000,00 | 275.000.000,00 | 236.797.841.707,00 | 226.207.181.778,00 | 9.846.502.484,00 | 16.158.010.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.644.344.191,00 | 242.365.192.484,00 | -4.279.151.707,00 |
| 1 | 02 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | 219.640.500.000,00 | 237.955.041.514,00 | 369.662.772.006,00 | 378.596.190.169,00 | 25.203.884.157,00 | 19.139.934.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394.866.656.163,00 | 397.736.124.621,00 | 2.869.468.458,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0000 | Dinas Kesehatan | 1.632.500.000,00 | 532.500.000,00 | 152.043.224.928,00 | 148.087.327.267,00 | 2.573.142.599,00 | 1.689.464.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.616.367.527,00 | 149.776.792.166,00 | -4.839.575.361,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0001 | Puskesmas Pilolodaa | 0,00 | 993.231.971,00 | 1.312.463.021,00 | 1.420.666.021,00 | 107.426.800,00 | 94.916.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.419.889.821,00 | 1.515.582.821,00 | 95.693.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0002 | Puskesmas Kota Timur | 0,00 | 1.456.048.716,00 | 1.923.154.980,00 | 2.012.939.480,00 | 52.616.500,00 | 60.644.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.975.771.480,00 | 2.073.583.980,00 | 97.812.500,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0003 | Puskesmas Kota Barat | 0,00 | 1.099.435.845,00 | 1.376.861.145,00 | 1.533.253.195,00 | 118.082.500,00 | 75.525.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.494.943.645,00 | 1.608.778.895,00 | 113.835.250,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0004 | Puskesmas Kota Tengah | 0,00 | 1.774.720.607,00 | 2.093.770.227,00 | 2.309.391.927,00 | 127.453.700,00 | 109.187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.221.223.927,00 | 2.418.578.927,00 | 197.355.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0005 | Puskesmas Dungingi | 0,00 | 1.435.179.696,00 | 1.776.606.617,00 | 1.876.443.480,00 | 157.911.275,00 | 157.910.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.934.517.892,00 | 2.034.353.892,00 | 99.836.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0006 | Puskesmas Kota Utara | 0,00 | 1.477.244.366,00 | 1.880.866.681,00 | 2.014.018.206,00 | 50.776.925,00 | 58.552.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.931.643.606,00 | 2.072.570.606,00 | 140.927.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0007 | Puskesmas Kota Selatan | 0,00 | 1.335.333.669,00 | 1.677.460.062,00 | 1.758.226.420,00 | 117.446.207,00 | 112.436.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794.906.269,00 | 1.870.663.269,00 | 75.757.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0008 | Puskesmas Dumbo Raya | 0,00 | 1.091.927.741,00 | 1.552.008.411,00 | 1.606.298.361,00 | 76.723.200,00 | 91.309.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628.731.611,00 | 1.697.607.461,00 | 68.875.850,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0009 | Puskesmas Hulonthalangi | 0,00 | 1.039.118.610,00 | 1.379.627.060,00 | 1.509.688.260,00 | 123.754.100,00 | 95.200.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.381.160,00 | 1.604.888.560,00 | 101.507.400,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0010 | Puskesmas Sipatana | 0,00 | 1.112.300.293,00 | 1.462.152.135,00 | 1.570.553.135,00 | 80.130.968,00 | 80.130.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542.283.103,00 | 1.650.684.103,00 | 108.401.000,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0011 | Rumah Sakit Aloei Saboei | 172.400.000.000,00 | 178.000.000.000,00 | 156.486.766.926,00 | 164.715.373.019,00 | 19.472.233.074,00 | 15.352.476.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.959.000.000,00 | 180.067.849.812,00 | 4.108.849.812,00 |
| 1 | 02 | 1.02.1.02.1.02.02.0012 | RSUD Otanaha | 45.608.000.000,00 | 46.608.000.000,00 | 44.697.809.813,00 | 48.182.011.398,00 | 2.146.186.309,00 | 1.162.178.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.843.996.122,00 | 49.344.190.129,00 | 2.500.194.007,00 |
| 1 | 03 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 6.204.500.000,00 | 6.204.500.000,00 | 14.411.614.556,00 | 16.785.461.684,00 | 18.567.263.537,00 | 15.485.546.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.978.878.093,00 | 32.271.008.406,00 | -707.869.687,00 |
| 1 | 03 | 1.03.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 6.204.500.000,00 | 6.204.500.000,00 | 14.411.614.556,00 | 16.785.461.684,00 | 18.567.263.537,00 | 15.485.546.722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.978.878.093,00 | 32.271.008.406,00 | -707.869.687,00 |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | 405.000.000,00 | 405.000.000,00 | 10.673.362.981,00 | 8.770.086.081,00 | 988.713.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.662.076.661,00 | 8.770.086.081,00 | -2.891.990.580,00 |

| Kode | | | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | | Belanja | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Jumlah Sebelum | Jumlah Sesudah | Bertambah/Berkurang |
| | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | | | |
| 8 | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00 | 0,00 | 4.810.534.784,00 | 5.608.459.180,00 | 275.170.800,00 | 25.139.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.085.705.584,00 | 5.633.598.980,00 | 547.893.396,00 |
| | | | **TOTAL** | **1.116.944.908.905,00** | **1.106.505.281.905,00** | **1.001.604.102.013,00** | **987.906.735.994,00** | **78.407.913.742,00** | **78.386.951.053,00** | **3.500.000.000,00** | **8.572.332.791,00** | **1.200.000.000,00** | **600.000.000,00** | **1.084.712.015.755,00** | **1.075.466.019.838,00** | **-9.245.995.917,00** |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran III : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
# RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
# TAHUN ANGGARAN 2025

| PENDAPATAN DAERAH | | | | |
|---|---|---|---|---|
| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 4 | PENDAPATAN DAERAH | 1.116.944.908.905,00 | 1.106.505.281.905,00 | |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 364.506.051.148,00 | 382.820.592.662,00 | |
| 4.1.01 | Pajak Daerah | 116.404.000.000,00 | 116.404.000.000,00 | |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 238.243.190.500,00 | 244.843.190.500,00 | |
| 4.1.03 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.500.000.000,00 | 5.500.000.000,00 | |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 4.358.860.648,00 | 16.073.402.162,00 | |
| 4.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 730.724.316.243,00 | 717.058.689.243,00 | |
| 4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 696.751.300.000,00 | 683.085.673.000,00 | |
| 4.2.02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 33.973.016.243,00 | 33.973.016.243,00 | |
| 4.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 21.714.541.514,00 | 6.626.000.000,00 | |
| 4.3.01 | Pendapatan Hibah | 0,00 | 626.000.000,00 | |
| 4.3.03 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 21.714.541.514,00 | 6.000.000.000,00 | |

| BELANJA DAERAH | |
|---|---|
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |
| Bidang Urusan | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN |
| Organisasi | : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan |
| Program | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
| Indikator Hasil | : Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah |
| Kegiatan | : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| - | - | | | |
| - | - | | | |
| - | - | 0,00 | 0,00 | |
| Sub Kegiatan | : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 14.057.600,00 | 14.057.600,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 48.894.000,00 | 58.394.000,00 | |
| Sub Kegiatan | : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | | | |

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 5 | BELANJA DAERAH | | | |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | | | |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 368.160.000,00 | 727.320.000,00 | |

**PEMBIAYAAN DAERAH**

| KODE REKENING | URAIAN | JUMLAH | | DASAR HUKUM |
|---|---|---|---|---|
| | | SEBELUM | SESUDAH | |
| 6 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | |
| 6.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN | 12.400.000.000,00 | 12.236.108.190,00 | |
| 6.1.01 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 12.400.000.000,00 | 12.236.108.190,00 | |
| 6.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN | 44.632.893.150,00 | 43.275.370.257,00 | |
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Daerah | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 | |
| 6.2.03 | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo | 42.632.893.150,00 | 41.275.370.257,00 | |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran IV : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN**

**KOTA GORONTALO**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Pagu Indikatif Belanja (Rp) | | | | | | | | | | |
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | Dinas Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| | 1.01.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi perangkat daerah | 15 Dokumen | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 2 | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 3 | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 6 | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 7 | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 3 Laporan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 1.01.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Layanan Administrasi Keuangan | 100 Persen | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | | | | | | | | | | | | |

| No | Kode | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | Total | | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota | 6 Dokumen | 368.160.000,00 | 727.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.160.000,00 | 727.320.000,00 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran V : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
## REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
## URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
## TAHUN ANGGARAN 2025

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | | PELAYANAN UMUM | | | | | | | | | | |
| 1 | 01 | 1 | 01 | Pendidikan | 190.782.312.643,00 | 184.717.970.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.782.312.643,00 | 184.717.970.082,00 |
| 1 | 01 | 1 | 02 | Kesehatan | 316.915.093.193,00 | 336.682.976.878,00 | 18.149.392.997,00 | 12.935.295.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.064.486.190,00 | 349.618.272.731,00 |
| 1 | 01 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9.010.216.456,00 | 10.508.779.556,00 | 0,00 | 62.971.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010.216.456,00 | 10.571.750.556,00 |
| 1 | 01 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 3.719.987.781,00 | 3.629.535.836,00 | 988.713.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.708.701.461,00 | 3.629.535.836,00 |
| 1 | 01 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 14.029.803.138,00 | 17.108.677.458,00 | 43.739.400,00 | 125.265.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.073.542.538,00 | 17.233.943.358,00 |
| 1 | 01 | 1 | 06 | Sosial | 5.176.264.409,00 | 4.999.667.335,00 | 199.830.000,00 | 257.448.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.376.094.409,00 | 5.257.115.355,00 |
| 1 | 01 | 2 | 07 | Tenaga Kerja | 5.264.672.546,00 | 5.180.572.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.264.672.546,00 | 5.180.572.931,00 |
| 1 | 01 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4.765.089.718,00 | 4.667.956.187,00 | 122.262.900,00 | 131.967.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.887.352.618,00 | 4.799.923.287,00 |
| 1 | 01 | 2 | 09 | Pangan | 4.088.936.178,00 | 4.003.061.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.088.936.178,00 | 4.003.061.639,00 |
| 1 | 01 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup | 6.703.830.120,00 | 6.202.401.956,00 | 61.274.300,00 | 43.698.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.765.104.420,00 | 6.246.099.956,00 |
| 1 | 01 | 2 | 12 | Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 4.715.493.425,00 | 4.142.510.808,00 | 297.045.800,00 | 84.267.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.012.539.225,00 | 4.226.778.508,00 |
| 1 | 01 | 2 | 13 | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 349.999.500,00 | 190.195.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349.999.500,00 | 190.195.100,00 |

| Kode | | | | Uraian | Kelompok Belanja | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 8 | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan | 196.243.575,00 | 196.243.575,00 | 103.756.425,00 | 103.756.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| 9 | | | | PERLINDUNGAN SOSIAL | | | | | | | | | | |
| 9 | 11 | 1 | 06 | Sosial | 2.662.011.040,00 | 2.405.689.800,00 | 0,00 | 6.502.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662.011.040,00 | 2.412.192.000,00 |
| 9 | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 1.029.810.800,00 | 909.395.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029.810.800,00 | 909.395.000,00 |
| | | | | **TOTAL** | **1.001.604.102.013,00** | **987.906.735.994,00** | **78.407.913.742,00** | **78.386.951.053,00** | **3.500.000.000,00** | **8.572.332.791,00** | **1.200.000.000,00** | **600.000.000,00** | **1.084.712.015.755,00** | **1.075.466.019.838,00** |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran VI : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
# REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A SPM Bidang Pendidikan | | | | |
| 1. | Angka Partisipasi Sekolah | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 0,00 | 0,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 831.182.000,00 | 165.000.000,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 0,00 | 0,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| | | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | 797.600.000,00 | 627.370.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | 442.500.000,00 |
| | | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan | 25.000.700,00 | 19.848.700,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 484.081.900,00 | 173.736.700,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 | 0,00 |
| | | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 30.000.400,00 | 25.913.400,00 |
| | | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 94.479.400,00 | 119.333.400,00 |
| | | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan | 0,00 | 0,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan | 0,00 | 0,00 |
| | | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | 54.670.700,00 | 54.670.700,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 0,00 | 0,00 |
| | | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | 531.310.000,00 | 102.695.000,00 |
| | | Pembangunan Ruang Kelas Baru | 0,00 | 0,00 |
| | | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik | 199.665.000,00 | 842.207.282,00 |
| | | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar | 500.000.000,00 | 440.000.000,00 |
| | | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | 600.000.000,00 | 1.418.880.000,00 |
| | | Total | 4.247.990.100,00 | 4.532.155.182,00 |

| No | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan | Alokasi Anggaran (Rp) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | 14.309.000,00 | 13.461.300,00 |
| | | Total | 14.309.000,00 | 13.461.300,00 |
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 43.843.800,00 | 29.625.300,00 |
| | | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 |
| | | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota | 200.000.000,00 | 0,00 |
| | | Total | 243.843.800,00 | 29.625.300,00 |
| 3. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 124.325.000,00 | 180.575.000,00 |
| | | Total | 124.325.000,00 | 180.575.000,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum | 382.477.800,00 | 223.661.600,00 |
| F SPM Bidang Sosial | | | | |
| 1. | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | 24.999.700,00 | 20.923.600,00 |
| | | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 20.304.900,00 | 11.663.900,00 |
| | | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | 6.489.800,00 | 2.406.600,00 |
| | | Pemberian Layanan Kedaruratan | 3.469.700,00 | 3.219.700,00 |
| | | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | 38.815.000,00 | 29.225.000,00 |
| | | Penyediaan Alat Bantu | 24.999.700,00 | 6.502.200,00 |
| | | Penyediaan Permakanan | 553.674.800,00 | 543.155.000,00 |
| | | Penyediaan Sandang | 74.741.000,00 | 51.427.700,00 |
| | | Total | 747.494.600,00 | 668.523.700,00 |
| 2. | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan | 11.599.900,00 | 3.513.600,00 |
| | | Penyediaan Makanan | 245.000.000,00 | 245.000.000,00 |
| | | Penyediaan Sandang | 24.999.900,00 | 12.274.400,00 |
| | | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi | 37.970.000,00 | 8.375.000,00 |
| | | Total | 319.569.800,00 | 269.163.000,00 |
| | | Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial | 1.067.064.400,00 | 937.686.700,00 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran VII : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
# SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN APBD
# TAHUN ANGGARAN 2025

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | 0,00 | 2.215.220.850,00 | 1.230.120.500,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 5.376.094.409,00 | 5.257.115.355,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | 0,00 | 70.251.600,00 | 36.307.700,00 |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 4.088.936.178,00 | 4.003.061.639,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 0,00 | 11.073.129.700,00 | 10.540.456.200,00 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 06 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL | | | |
| 1 | 06 | 06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | 0,00 | 359.569.900,00 | 290.687.900,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | 0,00 | 434.659.000,00 | 458.511.900,00 |
| 6 | | | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 6 | 01 | | INSPEKTORAT DAERAH | | | |
| 6 | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI | 0,00 | 1.806.694.400,00 | 741.450.000,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |

| KODE | | | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp) | RANCANGAN APBD (Rp) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sebelum | Sesudah |
| 1 | | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 12 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | |
| 2 | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 0,00 | 4.488.883.925,00 | 3.949.661.808,00 |
| 7 | | | UNSUR KEWILAYAHAN | | | |
| 7 | 01 | | KECAMATAN | | | |
| 7 | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | 0,00 | 3.862.656.025,00 | 2.588.955.825,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 09 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN | | | |
| 2 | 09 | 05 | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN | 0,00 | 26.003.800,00 | 90.192.900,00 |
| 5 | | | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | |
| 5 | 02 | | KEUANGAN | | | |
| 5 | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | 0,00 | 8.529.909.220,00 | 12.483.749.869,99 |
| 1 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 1 | 04 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | |
| 1 | 04 | 05 | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) | 0,00 | 1.198.336.100,00 | 911.222.900,00 |
| 2 | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | |
| 2 | 18 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | |
| 2 | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | 0,00 | 92.983.000,00 | 74.228.000,00 |
| 2 | 13 | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | |
| 2 | 13 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT | 0,00 | 279.999.700,00 | 114.755.000,00 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran VIII : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
## SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | | | | | | Dinas Pendidikan | 247.476.414.746,00 | 247.476.414.746,00 | 243.205.350.084,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 246.113.509.096,00 | 246.113.509.096,00 | 242.365.192.484,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | 246.113.509.096,00 | 246.113.509.096,00 | 242.365.192.484,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | | | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 56.461.662.680,00 | 56.461.662.680,00 | 57.201.644.802,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar | 30.023.576.430,00 | 30.023.576.430,00 | 30.535.903.178,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 299.980.500,00 | 299.980.500,00 | 299.980.500,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | 476.100.000,00 | 476.100.000,00 | 476.100.000,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | 646.312.556,00 | 646.312.556,00 | 646.166.600,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 1.101.658.000,00 | 1.101.658.000,00 | 1.635.959.000,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | 474.945.000,00 | 474.945.000,00 | 359.527.500,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | 1.997.547.719,00 | 1.997.547.719,00 | 2.150.099.423,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 15.882.200.000,00 | 15.882.200.000,00 | 15.882.200.000,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 875.912.200,00 | 875.912.200,00 | 866.612.200,00 |
| 1.01.2.22.0.00.02.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Kode | | | | | | Uraian | RKPD Perubahan | PPAS Perubahan | APBD Perubahan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 195.580.000,00 | 195.580.000,00 | 195.580.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 97.232.500,00 | 97.232.500,00 | 105.106.400,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 57.742.500,00 | 57.742.500,00 | 60.060.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.490.000,00 | 19.490.000,00 | 24.120.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.926.400,00 |
| | | | | | | **TOTAL** | **1.066.762.882.603,00** | **1.067.120.405.496,00** | **1.075.466.019.838,00** |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran IX : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
## SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM PRIORITAS KABUPATEN/KOTA
## TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 1 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kelurahan Dulalowo Timur | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 2 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. | Peningkatan Sumber Daya Manusia | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Dinas Pendidikan | 4.661.820.200,00 | 380.210.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.661.820.200,00 | 380.210.200,00 |
| 3 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kelurahan Wumialo | 308.881.096,00 | 267.335.619,00 | 47.768.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.649.150,00 | 267.335.619,00 |
| 4 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kelurahan Pulubala | 6.030.000,00 | 8.040.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030.000,00 | 8.040.000,00 |
| 5 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kelurahan Lekobalo | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kecamatan Sipatana | 15.011.000,00 | 11.615.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.011.000,00 | 11.615.000,00 |
| 7 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Sumber Daya Manusia | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | Puskesmas Kota Utara | 1.863.246.681,00 | 579.056.240,00 | 50.776.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.914.023.606,00 | 579.056.240,00 |
| 8 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Kelurahan Donggala | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| 9 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kecamatan Dungingi | 5.896.729.308,00 | 5.522.862.288,00 | 489.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.897.218.608,00 | 5.522.862.288,00 |
| 10 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Biawu | 208.704.500,00 | 83.210.500,00 | 0,00 | 123.794.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208.704.500,00 | 207.004.500,00 |
| 11 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 2.393.028.000,00 | 2.689.308.000,00 | 20.500.000,00 | 180.819.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413.528.000,00 | 2.870.127.300,00 |
| 12 | Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Badan Keuangan | 359.076.228,00 | 202.647.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.076.228,00 | 202.647.700,00 |
| 13 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kelurahan Pohe | 83.250.000,00 | 51.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.250.000,00 | 51.000.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program | SKPD Pelaksana | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD | | | | | | | | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Operasi | | Modal | | Tidak Terduga | | Transfer | | | |
| | | | | | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah | Sebelum | Sesudah |
| 399 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 2.852.162.260,00 | 3.634.198.480,00 | 734.037.500,00 | 2.006.504.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.586.199.760,00 | 5.640.702.870,00 |
| 400 | Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kelurahan Tenilo | 60.750.000,00 | 40.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.750.000,00 | 40.500.000,00 |
| 401 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kelurahan Bulotadaa Timur | 47.164.700,00 | 11.714.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.164.700,00 | 11.714.700,00 |
| 402 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan Sumber Daya Manusia | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | BAGIAN ORGANISASI | 553.239.485,00 | 296.723.902,00 | 131.986.841,00 | 3.419.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685.226.326,00 | 300.143.479,00 |
| 403 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat DPRD | 22.878.039.873,00 | 17.798.053.760,00 | 5.705.178,00 | 5.705.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.883.745.051,00 | 17.803.758.938,00 |
| 404 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM | Kelurahan Paguyaman | 38.129.400,00 | 11.179.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.129.400,00 | 11.179.400,00 |
| 405 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kelurahan Ipilo | 80.037.000,00 | 62.912.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.037.000,00 | 62.912.000,00 |
| 406 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kelurahan Lekobalo | 52.139.975,00 | 33.103.874,00 | 34.135.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.275.000,00 | 33.103.874,00 |
| 407 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kelurahan Paguyaman | 79.725.000,00 | 51.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.725.000,00 | 51.150.000,00 |
| 408 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kelurahan Libuo | 98.650.000,00 | 66.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.650.000,00 | 66.100.000,00 |
| 409 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. | Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kelurahan Molosipat U | 85.132.797,00 | 22.692.628,00 | 249.926.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.059.065,00 | 22.692.628,00 |
| | | | | **TOTAL** | **837.359.842.862,00** | **811.355.938.193,00** | **48.300.438.579,00** | **47.128.701.169,00** | **3.500.000.000,00** | **8.572.332.791,00** | **0,00** | **0,00** | **889.160.281.441,00** | **867.056.972.153,00** |

WALI KOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Lampiran X : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
## DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
## TAHUN ANGGARAN 2025

| GOLONGAN / RUANG | ESELON | | | | | NON ESELON | | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I | II | III | IV | V | TENAGA FUNGSIONAL | STAF | |
| Golongan IV/e | | | | | | 4 | | 4 |
| Golongan IV/d | 1 | | | | | 10 | | 11 |
| Golongan IV/c | | 21 | | | | 222 | 1 | 244 |
| Golongan IV/b | | 5 | 47 | 6 | | 337 | 1 | 396 |
| Golongan IV/a | | | 63 | 22 | | 245 | 9 | 339 |
| Golongan III/e | | | | | | | | |
| Golongan III/d | | | 20 | 223 | | 661 | 119 | 1023 |
| Golongan III/c | | | 1 | 100 | | 217 | 96 | 414 |
| Golongan III/b | | | | 45 | | 159 | 115 | 319 |
| Golongan III/a | | | | 2 | | 146 | 193 | 341 |
| Golongan II/e | | | | | | | | |
| Golongan II/d | | | | | | 72 | 138 | 210 |
| Golongan II/c | | | | | | 9 | 75 | 84 |
| Golongan II/b | | | | | | 9 | 4 | 13 |
| Golongan II/a | | | | | | 1 | 16 | 17 |
| Golongan I/e | | | | | | | | |
| Golongan I/d | | | | | | | 1 | 1 |
| Golongan I/c | | | | | | | 4 | 4 |
| Golongan I/b | | | | | | | | |
| Golongan I/a | | | | | | | | |
| PPPK | | | | | | 859 | | 859 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA

Lampiran XI : Peraturan Daerah
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 8 September 2025

# KOTA GORONTALO
# DAFTAR PIUTANG DAERAH
# TAHUN ANGGARAN 2025

| No | Uraian Rincian Piutang | Tahun Pengakuan Piutang | Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2 | Perkiraan Penambahan Tahun N-1 | Perkiraan Pengurangan Tahun N-1 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piutang Retribusi Jasa Ketatausahaan | 2003 | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| 2 | Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | 2003 | 20.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.142.000,00 |
| 3 | BAGIAN LANCAR TAGIHAN JANGKA PANJANG - DANA BERGULIR KEPADA MASYARAKAT | 2011 | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 4 | Piutang Retribusi Izin Perfilman | 2014 | 3.403.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.403.000,00 |
| 5 | Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah | 2017 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 6 | BAGIAN LANCAR TGR | 2024 | 42.744.922.582,21 | 6.164.928.656,19 | 909.960.815,26 | 47.999.890.423,14 |
| 7 | PIUTANG BAGI HASIL PAJAK PROVINSI | 2024 | 4.391.686.659,00 | 6.496.294.786,00 | 6.113.147.338,00 | 4.774.834.107,00 |
| 8 | PIUTANG HASIL KERJA SAMA DAERAH | 2024 | 13.037.869,00 | 21.390.818,13 | 12.385.669,00 | 22.043.018,13 |
| 9 | Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya | 2024 | 45.867.553,19 | 6.119,00 | 4.683.547,19 | 41.190.125,00 |
| 10 | Piutang Pajak Air Tanah | 2024 | 40.079.405,00 | 8.854.098,00 | 6.792.053,00 | 42.141.450,00 |
| 11 | Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 2024 | 18.309.416.619,00 | 13.176.050.173,00 | 11.654.969.074,00 | 19.830.497.718,00 |
| 12 | Piutang Pajak Hotel | 2024 | 5.844.507,00 | 0,00 | 0,00 | 5.844.507,00 |
| 13 | Piutang Pajak Parkir | 2024 | 87.324.350,00 | 0,00 | 0,00 | 87.324.350,00 |
| 14 | Piutang Pajak Penerangan Jalan | 2024 | 2.037.304.794,00 | 2.021.406.537,00 | 2.037.304.794,00 | 2.021.406.537,00 |
| 15 | Piutang Pajak Reklame | 2024 | 3.722.281.644,00 | 945.803.755,00 | 401.848.819,50 | 4.266.236.579,50 |
| 16 | Piutang Pajak Restoran | 2024 | 610.489.201,00 | 0,00 | 90.343.910,00 | 520.145.291,00 |
| 17 | PIUTANG PENDAPATAN BLUD | 2024 | 14.111.565.821,00 | 0,00 | 14.111.565.821,00 | 0,00 |
| 18 | Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan | 2024 | 4.568.402.200,00 | 35.442.786.926,00 | 17.819.295.620,00 | 22.191.893.506,00 |
| 19 | Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum | 2024 | 69.130.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 67.930.000,00 |
| 20 | Piutang Retribusi Pelayanan Pasar | 2024 | 2.475.346.600,00 | 2.653.380.000,00 | 243.019.500,00 | 4.885.707.100,00 |

| No | Uraian Rincian Piutang | Tahun Pengakuan Piutang | Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2 | Perkiraan Penambahan Tahun N-1 | Perkiraan Pengurangan Tahun N-1 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Total | 93.357.084.804,40 | 66.930.901.868,32 | 53.406.516.960,95 | 106.881.469.711,77 |

WALI KOTA GORONTALO

ADHAN DAMBEA